

BAB IV

PENERAPAN PENDIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH JARINGAN

GUSDURIAN SURABAYA PADA TAHUN 2011-2020

A. DUNIA PENDIDIKAN DARI SUDUT PANDANG JARINGAN GUSDURIAN

Pendidikan merupakan sebuah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang guna mengembangkan potensi dan keterampilannya. Kondisi belajar dan pembelajaran yang efektif dapat dicapai dengan melakukan penyusunan sebuah program belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan.¹ Sistem pendidikan sesuai yang telah diatur dalam UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa peserta didik dirasa telah dapat mengembangkan potensi dalam dirinya ketika mereka telah memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Potensi yang dikembangkan dalam diri individu melalui pendidikan diasari oleh kekuatan yang disebutkan diatas selanjutnya diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kearifan lokal pada masyarakat Indonesia yang telah diturunkan oleh para leluhur disesuaikan dengan kehidupan bangsa yang majemuk agar dapat berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.²

¹ Rohmatul Fithriyah dkk, *Pengaruh Model Discovery Learning dan Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar*, Jurnal Edukatif, Vol. 3 No.4, Tahun 2021, hlm. 1908

² Supardi U.S, *Arah Pendidikan Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi*, Jurnal Formatif, Vol. 2 No. 2, hlm. 114

Pendidikan sebagai kebutuhan yang secara mutlak harus dipenuhi selama manusia hidup, tanpa pendidikan maka manusia mustahil dapat berkembang menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan alam semesta. Pendidikan merupakan media yang paling efektif dalam mencetak generasi dengan kemampuan yang berorientasi pada keragaman sebagai bagian yang harus diperbaiki. Pendidikan tersebut secara merata di Indonesia dengan sifatnya yang beragam, dengan lembaga yang tersebar secara terstruktur di seluruh wilayah di Indonesia membuat pendidikan menjadi wadah yang efektif untuk mencapai tujuan dalam pembangunan karakter bangsa.³

Pendidikan dilakukan melalui proses pembelajaran seumur hidup, guna mencapai hasil yang diharapkan maka strategi pembelajaran dengan metode pembelajaran yang tepat diperlukan pendidik agar aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik berkembang secara berlanjut. Strategi pembelajaran dibuat melalui perencanaan yang merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan pada satuan pendidikan, melalui perencanaan maka wujud dari tujuan belajar diharapkan dapat dicapai.⁴ Strategi pembelajaran dikembangkan melalui pemahaman-pemahaman tertentu yang dalam prakteknya dimiliki oleh pendidik tanpa harus melakukan belajar secara formal. Setiap pendidik diwajibkan memiliki cara khusus saat melakukan proses belajar, sehingga upaya tersebut menjadi penunjang keberhasilan proses belajar untuk mencapai tujuan belajar yang mengembangkan potensi peserta didik.⁵

³ Aulia Fitriany dan Satrio Wibowo, *Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Nilai-Nilai Multikultural di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darut Taqwa Purwosari Pasuruan*, Jurnal Edukasi, Vol. 5 N0.2, Oktober 2019, hlm. 45

⁴ Izzatul Fajriyah dan Vici Biantami Putri Itaquillah, *Analisis Pembelajaran IPS Daring pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP Negeri 2 Tarik Sidoarjo*, Jurnal Artefak, Vol.8 No.2, September 2021, hlm. 119-121

⁵ Aulia Fitriany dan Izzatul Fajriyah, *Strategi Pembelajaran Sejarah dalam Kurikulum 2013 di Kelas XI SMA*, Jurnal STKIP PGRI Sidoarjo, Maret 2019, hlm. 2

Strategi pembelajaran yang diterapkan pendidik guna mengembangkan potensi peserta didik hendaknya diimbangi dengan upaya untuk mengembangkan rasa nasionalisme. Fokus pendidikan di Indonesia berorientasi pada keterampilan teknis yang mementingkan perkembangan *intelligence quotient* dibandingkan mengembangkan kemampuan *spiritual intelligence* dan *emotional intelligence* dibuktikan dengan kompetensi peserta didik diukur dari nilai akademik. Kondisi tersebut mengharuskan pendidik untuk mulai berbenah melalui strategi pembelajaran yang diharapkan mampu menyeimbangkan antara *intelligence quotient*, *spiritual intelligence* dan *emotional intelligence* sehingga tercipta generasi yang mampu mengola diri dan orang lain yang dibalut dengan rasa nasionalisme.⁶

Berkaca pada tujuan pendidikan menurut bapak pendidikan Indonesia, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya konkrit yang dapat memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan merupakan jalan menuju kemerdekaan lahir dan batin manusia, baik sebagai individu ataupun sebagai bagian dari masyarakat. Pendidikan menjadikan individu berdaulat atas dirinya sendiri sehingga dapat mengatur dirinya tanpa bergantung kepada orang lain. Kedaulatan diri manusia membuat manusia dapat menemukan jati dirinya sebagai subjek realitas sehingga tidak mudah terpengaruh pada hal-hal buruk di luar dirinya.⁷

⁶ FX Wartoyo, *Penilaian Pendidikan Berkarakter dalam Menarik Rasa Nasionalisme*, Jurnal Edukasi, Vol. 02 No.1, April 2016, hlm. 70

⁷ Bartolomeus Samho dan Oscar Yasunari, *Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Tantangan Tantangan Implementasinya di Indonesia*, Makalah Penelitian, Bandung :Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 27-32

Ki Hajar Dewantara dalam perjuangannya menyelenggarakan pendidikan pada masa penjajahan, mengharapkan agar setiap pribumi mendapatkan pendidikan untuk memerdekakan dirinya sehingga dapat secara sadar dan bersama memperjuangkan kemerdekaan dan mengangkat martabat bangsa Indonesia agar dapat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang telah merdeka terlebih dahulu.⁸ Pemikiran dan konsep pendidikan yang sejak lama diperjuangkan Ki Hajar Dewantara untuk bangsa Indonesia yang dalam praktek pendidikan hari ini telah banyak ditinggalkan, sudah saatnya dikembalikan ruhnyanya sesuai dengan tujuan pendidikan awalnya. Upaya kemajuan pendidikan hendaknya ditempuh secara berkelanjutan dan terus menerus, menyeimbangkan antara kebutuhan peserta didik dan lingkungan tanpa menghilangkan jati diri sebagai bangsa yang majemuk yaitu bangsa Indonesia.⁹

Pendidikan sebagai hak dasar setiap warga Negara sebagai individu guna mengembangkan potensi fitrah kemanusiaan yang ada pada diri setiap individu, sehingga pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia harus dikembangkan sama persisnya dengan kebutuhan mendasar rakyat lainnya. Gus Dur sebagai bapak bangsa mengembangkan konsep pendidikan berbasis *religious multiculturalism based education*, merupakan konsep pendidikan dengan dasar keagamaan dengan tujuan mendidik dan menghantarkan peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan berdaulat pada dirinya sehingga dapat terbebas dari

⁸Suhartono Wiryopranoto, *Perjuangan Ki Hajar Dewantara dari Politik ke Pendidikan*, Jakarta : Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, hlm. 57

⁹Henricus Suparlan, *Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantata dan Sumbangannya bagi Pendidikan Indonesia*, Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 1, Februari 2015, hlm 60

belunggu penindasan. Gus Dur tidak menolak adanya keragaman kebutuhan peserta didik dalam memenuhi potensi mereka, sehingga pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan mengesampingkan setiap keragaman menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pendidikan.¹⁰

Pendidikan memanusiakan manusia merupakan alat untuk memerdekakan dan membebaskan manusia agar dapat menemukan karakter dalam diri manusia yang sesungguhnya, sehingga pendidikan pada hari ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Gus Dur meyakini bahwa pembelajaran yang aktif, kreatif dan objektif selanjutnya dapat membawa peserta didik menjadi individu yang memiliki pemikiran kritis sehingga upaya peningkatan kualitas pendidikan dijalankan selaras dengan kebutuhan zaman.¹¹ Upaya peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi sorotan oleh masyarakat di dunia, berbagai pertemuan dan deklarasi dilakukan oleh berbagai lembaga pemerhati anak dan pendidikan seperti Unesco, Unicef dan UNDP hingga World Bank sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di dunia dengan mencetuskan deklarasi-deklarasi mengajak masyarakat lebih memperhatikan pendidikan.¹²

¹⁰Moch. Tohet, *Pemikiran Pendidikan Islam KH. Abdurrahman Wahid dan Implikasinya Bagi Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal *Edureligia*, Vol.1 No.2, Juli-Desember 2017, hlm.63

¹¹Ulfah Rahmawati dkk, *Relevansi Pendidikan Islam Prespektif Gus Dur di Era Milenial*, Jurnal *Mudarrisuna*, Vol. 10 No.1, Januari-Juni 2020, hlm. 533

¹²Riswan Lapagu, *Pendidikan untuk Semua : Sejarah, Kondisi Pendidikan Setelah Jomtien dan Dakar, dan Tindakan yang Perlu Dilakukan*, Jurnal *Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 3 No.4, Oktober-Desember 2005, hlm.6

Deklarasi yang terkenal dan dipegang oleh berbagai pegiat pendidikan di dunia salah satunya adalah Deklarasi Dakar, isi dari Deklarasi Dakar meliputi : pertama, memperbaiki serta memperluas semua perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama pada anak-anak dengan kondisi tertentu; kedua, menjamin seluruh anak-anak terutama anak perempuan yang mengalami kondisi sulit dan minoritas dapat memiliki solusi dalam upaya menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar dengan bebas dan berkualitas; ketiga, menjamin anak semua kebutuhan belajar anak muda dan orang dewasa dapat terpenuhi dengan adil melalui program pendidikan kecakapan hidup sesuai kebutuhan.

Keempat, perbaikan tingkat keaksaraan orang dewasa mencapai 50% khususnya bagi perempuan dengan cara yang adil untuk pendidikan dasar dan berkelanjutan; kelima, menghapus kesenjangan *gender* dalam mengenyam pendidikan terutama pendidikan dasar hingga menengah dengan kualitas pendidikan yang baik; Keenam, memperbaiki segala aspek yang mempengaruhi kualitas dan menjamin kualitasnya, sehingga hasil pembelajaran dapat terukur khususnya pada keaksaraan dan kecakapan hidup.¹³ Pada waktu yang sama, upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia terus dilaksanakan mulai tingkat pemerintahan sebagai pemilik kebijakan hingga lembaga pendidikan sebagai pelaksana.

¹³Muhardi, *Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia*, Jurnal Mimbar, Vol. 20 No.4, Oktober-Desember 2004, hlm.483

Kualitas pendidikan di Indonesia terus diupayakan oleh pemerintah didukung oleh berbagai pihak penunjang pendidikan, penunjang tersebut meliputi pihak-pihak yang terkait dengan lingkungan pendidikan baik lembaga pendidikan formal dan nonformal, pihak swasta dan masyarakat. Masyarakat tertentu bahkan mengupayakan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka dengan mencari sekolah dengan kualitas dan standart pendidikan internasional yang baik menurut pemahaman mereka meskipun harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Kualitas pendidikan oleh sebagian masyarakat hari ini menjadi sebuah pertimbangan yang cukup serius, pemahaman akan kualitas pendidikan yang baik menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas telah melekat pada masyarakat modern saat ini.¹⁴

Pendidikan nasional merupakan strategi untuk menyiapkan generasi masa depan memasuki kehidupan dengan berbagai tantangan pada masanya. Kualitas kemanusiaan pada peserta didik sehingga diharapkan dapat menjadi penerus bangsa selanjutnya menentukan proses pendidikan berlangsung. Pendidikan dalam amanat konsistional sebagai salah satu tujuan negara sesuai yang dituliskan pada pembukaan UUD 1945. Pendidikan Nasional berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional dan tanggap terhadap perubahan zaman berdasarkan pada pembukaan UUD 1945 dan pancasila sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional selanjutnya dijabarkan sebagai upaya dalam mengembangkan potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

¹⁴Siti Alifah, *Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia untuk Mengejar Ketinggalan dari Negara Lain*, Jurnal Penelitian Cermin, Vol. 5 No.1, Juli 2021, hlm.114

berakhlak mulia, sehat berilmu cakap, kreatif mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Realisasi pelaksanaan pendidikan nasional di lapangan sesuai dengan yang diharapkan oleh konstitusional nyatanya mengalami berbagai kendala.

Kebijakan pendidikan nasional yang diselenggarakan selama Indonesia merdeka nyatanya lebih mengacu pada suatu paham ekonomi politik tertentu dimana proses pendidikan diarahkan agar peserta didik nantinya dapat menjadi tenaga profesional dalam pembangunan ekonomi. Kerja ekonomi dengan semangat memenangkan persaingan secara bebas dirasa lebih menonjol, hingga merasuk kedalam ranah dunia pendidikan diwujudkan dengan adanya persaingan bebas atas prestasi belajar siswa dengan diformalkannya kebijakan ujian nasional.¹⁵ Pendidikan berorientasi pada politik ekonomi global selanjutnya menghasilkan sistem pendidikan dengan biaya yang tinggi. Biaya buku-buku pelajaran yang harus selalu diperbaharui, biaya seragam sekolah, pencapaian peserta didik diukur melalui penilaian yang kuantitatif dilihat dari adanya penyeragaman proses kelulusan diukur melalui hasil penilaian ujian nasional sehingga mendorong semakin banyaknya komersialisasi di dunia pendidikan.¹⁶

Komersialisasi di dunia pendidikan dapat dilihat dengan banyaknya bermunculan bimbingan belajar dengan berbagai strategi dan biaya selangit untuk memberikan bekal pada siswa agar lulus ujian dan masuk ke sekolah favorit. Pelayanan pendidikan yang eksklusif dihadapkan dengan keragaman masyarakat

¹⁵Mochtar Buchori, *Pendidikan Antisipatoris*, Yogyakarta : Kanisius, 2005, hlm. 26-35

¹⁶Nurtanio Agus, *Pengaruh Politik dalam Bidang Pendidikan*, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 4 No. 2, 2008, hlm. 1-2

Indonesia semakin memperkuat kesenjangan sosial di dalam masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kondisi penyelenggaraan pendidikan dirasa telah menciptakan banyak kesalahpahaman dalam masyarakat berhubungan dengan apa dan bagaimana pendidikan dijalankan. Bagi sebagian warga negara dengan alasan ideologi maupun sosial, ekonomi dan geografis tertentu memilih jalan pendidikan non formal, meskipun demikian pilihan tersebut juga tidak semata-merta kemudian mereka mendapatkan kemerdekaan dalam menentukan arah dan model pendidikan non formal mereka.¹⁷

Administrasi pendidikan dengan standart-standartnya yang baku dalam menjalankan dunia pendidikan, pada akhirnya menciptakan dikotomi yang merendahkan pendidikan non formal dengan mengharuskan arah pendidikan sesuai dengan standart yang telah diberlakukan oleh pendidikan formal. Jika ditelaah lebih mendalam seharusnya jika pendidikan formal dan non formal berjalan dengan beriringan dan sejajar, akan membuat pendidikan di Indonesia menjadi lebih beragam dan dinamis. Pengeroposan makna dan fungsi proses pembelajaran selanjutnya menjadi semakin menguat karena terjadi penggeseran orientasi belajar yang sesungguhnya.¹⁸ Proses belajar mengajar sebagai inti dari pendidikan yang seharusnya berorientasi untuk menumbuhkan kemampuan memahami, menganalisis, membuat dan memecahkan masalah, menemukan pengetahuan baru, serta menghayati nilai-nilai dan menumbuhkan sikap kritis, kreatif, mampu bekerjasama dan komunikatif guna mewujudkan ilmu yang

¹⁷Asmirawati, *Komersialisasi Pendidikan*, Jurnal Equilibrium, Vol.4 No.2, 2016, hlm.177

¹⁸Jumpa Ukur, *Manfaat Kendala Administrasi Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Vol. 6 No.1, Pebruari 2020, hlm.5-6

bermanfaat dan karakter pribadi yang unggul. Pada prakteknya keberhasilan belajar hanya diukur dari nilai (angka). Formalitas pendidikan semakin mengecilkan fungsi dan makna belajar, bahkan dalam tahap tertentu telah mendistorsiproses pembentukan karakter siswa misalnya dengan adanya kebocoran soal pada ujian, kebiasaan mencontek saat ujian yang tanpa disadari merupakan kebiasaan yang dapat menanamkan sikap korupsi.¹⁹

Banyak miskonsepsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, jika kita mau mencermatinya. Contohnya adalah proses pendidikan siswa selalu dikaitkan dan dipahami sebagai proses yang dilalui peserta didik melalui pendidikan formal atau pendidikan di sekolah sedangkan pembelajaran di luar sekolah bukan merupakan proses pendidikan. Prestasi belajar selanjutnya merupakan sebuah pencapaian peserta didik terhadap hal-hal yang teoritis-kognitif dalam lingkungan pendidikan formal, sedangkan pencapaian unggul dalam sikap dan keterampilan hidup tidak dianggap sebagai prestasi. Proses pendidikan pada akhirnya hanya mereduksi kemanusiaan hanya pada aspek intelektual, namun tidak melihat dari sisi kemanusiaan yang lain, sebagai makhluk multidimensional.

Kritik terhadap standarisasi proses dan hasil belajar telah semakin gencar disampaikan oleh berbagai pemerhati pendidikan dari beragam kalangan sejak awal reformasi. Meskipun demikian dunia pendidikan masih saja menjadi dampak dari kebijakan politik ekonomi oleh pemerintah yang belum secara terbuka melakukan perubahan, sehingga perkembangan pada dunia teknologi yang semakin cepat dan pesat serta perubahan sudut pandang pendidikan yang

¹⁹Priarti Megawati, *Meretas Permasalahan di Indonesia*, Jurnal Formatif, Vol. 2 No.3, 2018, hlm. 228-229

dilakukan oleh berbagai negara maju di berbagai belahan dunia secara tidak langsung membawa perubahan pada paradigma pendidikan di Indonesia. Respon pemerintah terhadap pengaruh perkembangan teknologi terhadap dunia pendidikan memberikan dampak secara langsung pada perubahan sosial-budaya pada dunia pendidikan.²⁰

Gagasan pendidikan kemudian memunculkan kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka, meskipun secara konseptual tidak semua pemerhati dunia pendidikan sepakat dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Pendidikan yang memanusiakan manusia memfokuskan pada pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Pemahaman tersebut menjadikan kebutuhan peserta didik dalam belajar menjadi lebih mudah dipahami sehingga dapat meminimalisir kekerasan pada peserta didik baik dalam bentuk struktur maupun kultural dapat dicegah. Berbagai upaya dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan yang ramah pada keadaan ragam potensi peserta didik yang dipengaruhi sosio, kultural dan ekonomi.²¹

Pendidikan yang memanusiakan manusia diharapkan dapat menjadi pengalaman dan pembiasaan yang nantinya dapat menjadikan tumbuh kembang dan kreativitas sekaligus karakter peserta didik menjadi rendah hati sehingga dapat memperkuat solidaritas sosio-kebangsaan. Pandemi yang melanda dunia pada tahun 2020 memberikan refleksi tersendiri terhadap dunia pendidikan,

²⁰Etistika Yuni Wijaya dkk, *Transformasi Pendidikan Abad 21 sebagai Tuntutan Pengebangan Sumber Manusia di Era Global*, Makalah Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2016, Malang : Universitas Kanjuruhan, Vol.No.01, 2016, hlm. 263

²¹Fieka Nurul Arifa, *Implementasi Kurikulum Merdeka dan Tantangannya*, Jurnal Info Singkat, Vol. 14 No.9, Mei 2012, hlm.26-29

mengingatkan kembali pada sosok Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan yang menyatakan bahwa setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Pandemi harus dan memaksa segala aktivitas pendidikan berada di rumah, mengharuskan teknologi digunakan secara tepat pada dunia pendidikan dari rumah.²² Kondisi tersebut membuka kenyataan bahwa terjadi kesenjangan antara pendidik dan peserta didik dalam penggunaan teknologi, dimana pendidik merupakan *immigrant digital* yang merupakan fasilitator dalam proses pembelajaran yang sebagian besar adalah generasi milenial dan alfa sebagai *native digital*.

Kondisi diatas menjadikan cerminan bagi pemerintah untuk kemudian merespon dengan meluncurkan kurikulum yang lebih sederhana baik dari sisi kompetensi dasar hingga administasi pembelajaran. Ternyata kondisi pendidikan tidak sesederhana pergantian kurikulum pendidikan, dibelakangnya masih menyisakan berbagai problematika.²³ Kualitas proses pembelajaran yang dilakukan dirumah pada masa pandemi memunculkan pertanyaan besar tentang bagaimanakah kualitas pendidikan yang dilakukan dari rumah hingga bagaimana pendidikan pada era new normal dijalankan. Struktur birokrasi pada pelayanan pendidikan nasional masih didominasi oleh pemikiran ekonomi global sehingga nilai-nilai yang menjadi dasar bangsa Indonesia hanya berlaku pada pendidikan personal yang non formal di lingkungan masyarakat tumbuh. Kondisi tersebut

²²Arif Widodo, *Problematika Pembelajaran Daring dari Prespektid Mahasiswa*, Jurnal Else, Vol. 4 No.1, Agustus 2020, 100-105

²³Intan Safitri Mokodompit, *Home Visit sebagai Refleksi Kurikulum Darurat Covid-19: Kesiapan Guru, Respon Siswa, Materi dan Hasil Belajar di Madrasah Tsanawiyah*, Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, Vol. 6 No.2, 220, hlm. 122

rentan membawa pendidikan dalam kondisi miskonsepsi sehingga berbeda apa yang dirancang dan disepakati di tingkat nasional dengan apa yang terjadi dalam praktek pendidikan di lapangan.²⁴

B. REKOMENDASI GUSDURIAN ATAS SISTEM PENDIDIKAN YANG DISAMPAIKAN PADA TEMU NASIONAL JARINGAN GUSDURIAN TAHUN 2020

KH. Abdurrahman Wahid meneladankan nilai-nilai yang dapat menumbuhkan konsep pendidikan karakter dan mengedepankan moralitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan karakter yang diharapkan adalah pendidikan karakter yang mengandung kearifan lokal, yang dalam pelaksanaan pendidikan didasari dengan nilai-nilai tradisi dan agama. Kearifan lokal yang dimaksud adalah kearifan lokal yang terbentuk dari taradisi lokal dan lokalitas ajaran agama menjadi dasar yang membentuk pengalaman yang nantinya diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup sehingga berguna dalam proses kedewasaan pribadi melalui proses pendidikan.²⁵

Proses pendidikan yang terbentuk dari berbagai ranah merupakan bagian yang substantif dari sebuah proses panjang menjadi Indonesia. Gusdurian merasa perlu mengembangkan dan menyatakan sikap kritis atas keadaan pendidikan yang tengah berlangsung di masyarakat dengan melakukan pendekatan dan penelitian menggunakan sudut pandang dari nilai-nilai Gusdurian. Gusdurian selanjutnya

²⁴ Leli Anggraeni, *Pola Komunikasi Civitas Akademik dalam Ruang Virtual di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 12 No.2, Oktober 2021, hlm. 158-159

²⁵ M. Sofyan al-Nashr, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal : Telaah Pemikiran Abdurrahman Wahid*, Skripsi, Semarang : IAIN Wali Songo, 2010, hlm. 66-68

dapat menentukan posisi agar dapat menentukan langkah dalam gerakan sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam bidang pendidikan, langkah tersebut merupakan salah satu bagian penting dalam perjuangan menjadi bangsa yang selalu menjunjung martabat kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok pemikiran jaringan Gusdurian terhadap sistem pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menjadi pertimbangan posisi dan langkah gerakan diuraikan menjadi beberapa point meliputi : pendidikan merupakan proses berkelanjutan yang memanusiakan manusia, sehingga setiap individu dengan beragam kondisi hendaknya mendapatkan fasilitas dalam sistem pendidikan nasional; pendidikan memiliki jalan yang beragam, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberi fasilitas dan menjamin hak otonomi warga dan memastikan keberlangsungan cita-cita nasionalisme; pendidikan agama-agama perlu mengedepankan substansi ajaran agama, sehingga perbedaan tafsir dalam agama oleh para pemuka agama tidak meruntuhkan toleransi yang diajarkan oleh semua agama sebagaimana yang dijunjung oleh nilai-nilai kearifan lokal; terakhir semua lembaga pendidikan dan masyarakat sebagai ruang belajar masyarakat harus dibebaskan dari praktek intoleransi serta diskriminasi yang dapat menghalangi perkembangan generasi muda Indonesia.

C. PERAN JARINGAN GUSDURIAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Jaringan Gusdurian telah memetakan bagaimana jaringan berperan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, penegasan yang dilakukan oleh jaringan Gusdurian dalam menetapkan arah langkahnya perannya di dunia pendidikan. Jaringan Gusdurian memerlukan rumusan yang berkaitan dengan dunia pendidikan ideal di masyarakat. Ketika pendidikan dikatakan ideal saat terjadi keseimbangan antara hubungan di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah, sesuai dengan tri sentra pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus secara konsisten menempatkan peserta didik sebagai subjek yang dihargai sebagai manusia seutuhnya dengan beragam keunikannya.²⁶

Penerapan tri sentra pendidikan yang tepat didukung dengan ruang belajar dan sumber belajar yang tidak terbatas nantinya akan menghasilkan manusia-manusia dengan karakter yang kuat dan keratif. Peningkatan pengetahuan dan cara pandang pendidikan juga perlu dilakukan oleh setiap pendidik dengan memaksimalkan dukungan manajemen pendidikan, serta melibatkan peranan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kolaborasi tersebut kemudian didukung dengan kontekstualisasi arah dan tujuan pendidikan sehingga arah dan tujuan mengarah pada capaian yang tanpa standarisasi tetapi pada kontekstualisasi, berkaca bahwa pendidikan harus menjadikan keragaman sebagai realita kemanusiaan.²⁷

²⁶ Evi Wijayanti, *Komunitas Santri Gus Dur Yogyakarta 2017-2019*, Skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2019, hlm. 45-47

²⁷ Machful Indra Kurniawan, *Tri Pusat Pendidikan Sebagai Sarana Pendidikan Karakter Anak Sekolah Dasar*, *Jurnal Pedagogi*, Vol. 4 No. 1, Februari 2015, hlm. 41-42

Bercermin pada pemikiran diatas, sehingga jaringan Gusdurian melakukan peranan dengan berbagai aktivitas meliputi : pertama, merintis gerakan advokasi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan nasional supaya dapat berjalan berdasarkan tujuan kemerdekaan Indonesia yang menciptakan manusia pancasila, memiliki kualitas dalam menghadapi tantangan global, berpegang teguh pada kearifan local dan terbuka pada nilai-nilai global; kedua, berpartisipasi melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada orang tua, lembaga social masyarakat dan budaya tentang pentingnya kolaborasi pendidikan untuk memenuhi pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik pada saat ini; ketiga, membantu menyiapkan model kolaborasi tri sentra pendidikan di beberapa wilayah percontohan ke arah pendidikan formal dan non formal.

Keempat, membantu para pendidik di lingkungan tri sentra pendidikan untuk mendapatkan kompetensi yang tepat berkenaan dengan teknologi informasi kemudian bagaimana dapat membuat media pembelajaran yang menarik disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik pada masa sekarang; kelima, melatih para pendidik untuk dapat meningkatkan kemampuan menjadi fasilitator hingga mengasah kemampuan menjadi sumberdaya yang memiliki kapasitas untuk mendidik. Gusdurian selanjutnya menjadi penghubung bagi semua pemerhati hingga pelaku pendidikan dalam melakukan kritik atas realitas pendidikan nasional dengan melakukan advokasi di tingkat struktural dan pendidikan masyarakat di tingkat kultural untuk meminimalisir *mispersepsi* atas pendidikan dan bersama berbagai komponen menawarkan konsep-konsep yang dibutuhkan agar pendidikan mencapai tujuan yang diharapkan.